



**PEMERINTAH DAERAH
LAMPUNG TENGAH**



RENJA

RENCANA KERJA TAHUN 2024

BAPENDA
BADAN PENDAPATAN DAERAH



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, dimana kami telah dapat menyelesaikan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Rancangan Rencana pembangunan Tahunan Daerah Badan Pendapatan Daerah dibuat untuk periode satu tahun yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah dimana dalam RENJA SKPD tergambar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masa satu tahun. Dalam pelaksanaan RENJA SKPD diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal, pemerintah mempertanggung jawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Dalam Renja Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tergambar Rencana Kerja dan Capaian kinerja untuk Tahun 2024. Rencana Kerja Merupakan sasaran yang ingin dicapai selain arahan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam tahun 2024, mencakup pula pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang sebelumnya tidak direncanakan. Analisis dilakukan secara mendalam pada setiap sasaran untuk memperlihatkan kinerja sesungguhnya dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi.

Akhirnya, kami berharap agar Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh stakeholders dan media untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Gunung Sugih, Januari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Drs. ASRUL SANI
NIP. 19660621 198603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pengertian Renja SKPD.....	2
1.3. Proses Penyusunan Renja SKPD	2
1.4. Keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD	2
1.5. Landasan Hukum	4
1.6. Maksud dan Tujuan.....	5
1.7. Sistematika Penulisan	6
BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu Capaian Renstra SKPD	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	17
2.4. Reviuw terhadap Rancangan awal RKPD	18
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.....	25
3.1. Telaah terhadap kebijakan basional.....	25
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD.....	26.
3.3. Program dan Kegiatan	27
BAIV Rancanga kerja dan pendanaan perangkat daerah	34
BAB V Penutup	35

Halaman Tabel :

Tabel TC 29	10
Tabel TC 30	16
Tabel TC 31	19
Tabel TC 32	29

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tanggal 29 Desember 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, maka terdapat Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah Menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Dalam rangka mensukseskan Kebijakan Nasional tentang pelaksanaan otonomi Daerah dan mendukung keberhasilan pelaksanaan program –program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah , Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah berupaya semaksimal mungkin memberikan kontribusi yang nyata melalui penyusunan dan pelaksanaan program – program kerja yang dapat dilaksanakan , tepat guna dan tepat sasaran.

Sebagai salah satu acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk melaksanakan program-program kerja efektif dan efisien serta transparan, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari rancangan awal rencana strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021- 2026.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Oleh Karena itu, Penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel bersamaan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksistensi SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD,

Dalam rangka implementasi peraturan perundangan tersebut sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Sasaran Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

1.2. Pengertian RenjaSKPD

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

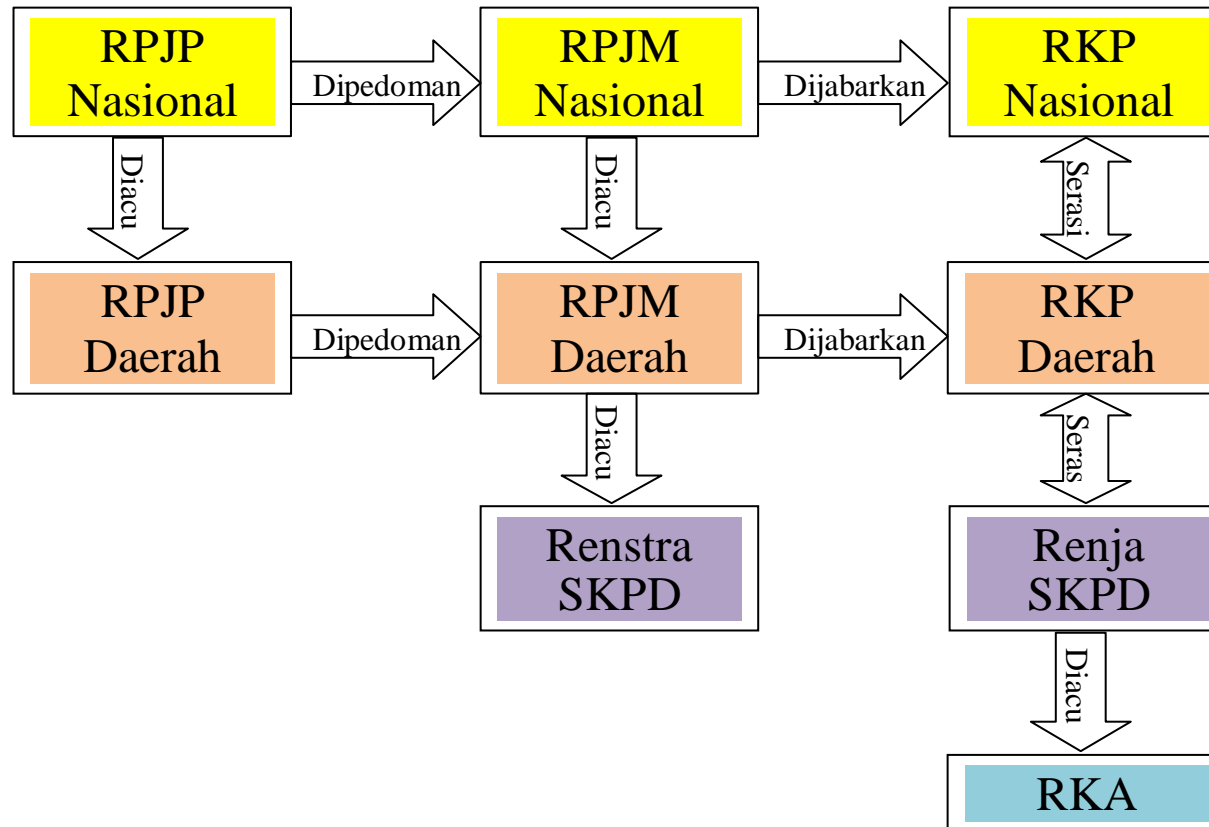
1.3. Proses Penyusunan Renja SKPD

Dalam prosesnya, penyusunan renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPd, oleh karena itu penyusunan rancangan renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPd, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renstra SKPD. Penyusunan renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

- 1.3.1. Tahap perumusan rancangan renja SKPD ; dan
- 1.3.2. Tahap penyajian rancangan renja SKPD

1.4. Keterkaitan antara renja SKPD dengan dokumen RKPd

Keterkaitan antara rencana kerja SKPD dengan Dokumen RKPd dapat dilihat dalam bagan tersebut di bawah ini :



1.5.Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja BAPENDA Lampung Tengah Tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
7. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
13. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten lampung tengah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengarustamaan Gender.
15. Peraturan Bupati lampung tengah nomor 7 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten lampung tengah nomor 1 tahun 2019 tentang kabupaten layak anak.

1.6. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Kerja (RENJA) pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan kerja agar tetap berada pada koridor perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah dengan prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah. Renja ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Draft Awal Rencana Kerja sebagai bagian integral dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Penyusunan Rencana Kerja yang efektif dan efisien .

Penyusunan Renja ini memiliki dua Tujuan utama yaitu :

1. Rencana Kerja (RENJA) merupakan sarana bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk membuat suatu Program/Kegiatan.
2. Rencana Kerja (RENJA) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Tahun sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.
3. Rencana Kerja (RENJA) merupakan Pedoman Penyusunan RKA perangkat daerah

Dua Tujuan utama RENJA tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) oleh setiap instansi pemerintah.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkasan tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD

1.4. Sistematika

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun- tahun sebelumnya.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antararancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dan rancangan awalan RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

III.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

III.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Renja Badan Pendapatan Daerah merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya akan lebih baik. Selain daripada itu evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada daerah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan dilakukan.

Secara umum Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun program dan kegiatannya yang ada sekarang dan ditahun lalu disesuaikan dengan bidang urusan yang menyangkut urusan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah)

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra 2024 dapat di lihat pada tabel T.C 29

T.C 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH S/D 2023
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 -2025 (2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2023) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2021 s/d 2025		Capaian
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	(11=10/4)	12
5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
5	02	Keuangan									
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	100	100	100	100%	100	100
				Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100%	100	100
				Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100	100	100	100	100%	100	100
				Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	100	100	100	100	100%	100	100

5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	2	100%	2	6	3	
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	2	2	100%	2	6	2	
5	02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen penganggaran dan pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68	68	66	66	100%	68	202	2.9	
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	1	1	100%	1	3	1	
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	3	3	3	100%	3	9	3	
5	02				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	18	18	100%	-	18	18	

5	02				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesentase jenis kecukupan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	13	7	7	100%	13	33	2.7
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	2	13	13	100%	2	17	17
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28	36	20	20	100%	36	92	3.2
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	21	18	20	20	100%	18	56	2.6
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	72	80	80	100%	72	224	2.4
5	02				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Kantor	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	7	7	0	-	7	7
5	02				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana kantor	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	4	4	4	4	100%	4	12	3

					Daya Air dan Listrik yang Disediakan									
5	02				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jenis sarana dan prasarana aparatur yang optimal	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	23	23	23	100%	23	69	3
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89	82	9	9	100%	82	173	1.9
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	2	2	100%	2	6	3
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pajak Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
						Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
						Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pesentase Penerimaan Pendapatan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	10	2	2	2	100%	2	6	0.6

5	02	04	201	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	10	12	6	6	100%	12	30	3	
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	23	36	22	22	100%	36	94	4	
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	114	114	29%	-	114	114	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2	2	2	2	100%	2	6	3	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	12	12	12	100%	12	36	2	
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	7.400	9.105	128.567	128.567	91%	9.105	146.777	19.8	
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	651.000	64.889	640.686	640.686	96%	64.889	770.464	1.18	
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12.800	11.410	12.523	12.523	76%	11.410	35.343	2.7	
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	12	12	12	100%	12	36	3	

5	02	04	2.1	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8	9	9	9	100%	9	27	3.3	
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	3.270	2.076	3.253	3.253	66%	2.076	7.405	2.2	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10	9	9	9	100%	9	27	2.7	
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	11	13	13	13	100%	13	39	3.5	

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Secara umum dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator sasaran yang mencapai target yang diharapkan. Di sisi lain, keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing Bidang. Pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada tabel T.C30

TC.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No	Indikator	SPM/	IKK (2022)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
		Standar Nasional		Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024
1	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD		13	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 10 tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Badan Pendapatan daerah, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Badan pendapatan Daerah kabapten Lampung Tengah mempunyai tugas mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, transparansi, partisipatif dan akuntabel yang didukung oleh aparat yang profesional. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah selaku pengelola pendapatan daerah berbagai permasalahan dihadapi berikut daftar permasalahan yang dihadapi di seluruh bidang SKPD Bapenda:

1. Kurang optimal pelayanan kepada wajib pajak
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi
3. Belum optimalnya sinergitas antara instansi pengelolaan petugas pemungut pajak daerah & retribusi daerah.
4. Cakupan Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Terlalu Luas.
5. Kurang Sumber Daya Manusia

Disamping permasalahan di atas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah juga menghadapi tantangan dan peluang diantaranya :

1. Tantangan
 1. Mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak
 2. Meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
2. Peluang
 - a. Adanya Sistem Pengelolaan Pajak Daerah & Retribusi Daerah berbasis IT
 - b. Tingkat pendidikan aparatur pengelola yang tinggi
 - c. Kuantitas aparatur pengelola pendapatan daerah

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program /kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel T.C31

TC.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Rencana Kerja RKPD 2024						Hasil Analisis Kebutuhan 2025					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indukatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indukatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bapenda	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	43.434.857.867	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bapenda	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	50.152.195.238	
			Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100				Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100		
			Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100				Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100		
			Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	100				Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	100		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	100	68.164.300,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	100	68.164.300	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	48.396.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	48.396.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	19.768.300,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	19.768.300	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bapenda	Persentase dokumen penganggaran dan pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu		14.187.347.308,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bapenda	Persentase dokumen penganggaran dan pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu		14.895.731.242	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68	13.352.663.108,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68	13.691.952.542	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	806.896.900,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1,170,991,400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	27.787.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	32,787,300	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bapenda	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	100		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bapenda	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	100	50,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bapenda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bapenda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	50,000,000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bapenda	Persentase jenis kecukupan administrasi perkantoran		307.895.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bapenda	Persentase jenis kecukupan administrasi perkantoran		650,281,500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bapenda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	11.776.400,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bapenda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	11,776,400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapenda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	3.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapenda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	299,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bapenda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28	14.474.500,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bapenda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28	19,897,500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bapenda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	21	100.536.100,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bapenda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	21	115,025,600	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	178.108.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	204,582,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Kantor	100	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Kantor	100	793,350,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bapenda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bapenda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	793,350,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	Persentase prasarana kantor		28.390.744.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	Persentase prasarana kantor		33.888.562.396	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	28.390.744.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	33.888.562.396	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang optimal		480.707.259,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang optimal		520.120.800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bapenda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	325.690.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bapenda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	325,690,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bapenda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89	119.280.800,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bapenda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89	134,580,800	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bapenda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	35.736.459,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bapenda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	59,850,000	
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bapenda	Persentase Realisasi Pajak Daerah	100	2.522.306.100,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bapenda	Persentase Realisasi Pajak Daerah	100	3,522,663,500	
			Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100				Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100		
			Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	100				Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	100		
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	100	2.522.306.100,00	2.522.306.100,00	Bapenda	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	100	3,522,663,500	

Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	10	47.294.000,00	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	10	49,894,000	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	10	41.964.000,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	10	53,664,000	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	23	131.084.700,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	23	175,522,200	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		-	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2	313.876.900,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2	322,876,900	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	209.915.000,00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	480,715,000	
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Bapenda	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	7400	1.390.407.900,00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Bapenda	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	7400	1,763,150,400	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	651000	67.676.500,00	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	651000	163,546,500	

Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12800	45.193.500,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12800	86,630,700	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	23.487.000,00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	25,513,000	
Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8	90.330.600,00	Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8	177,330,600	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	3270	56.492.300,00	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	3270	100,186,500	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10	58.815.500,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10	73,815,500	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	11	45.768.200,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	11	49,818,200	
Jumlah				45.957.163.967,00	Jumlah				53.674.858.738	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai arahan RPJMN 2005-2025 sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya asing.

Dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka visi presiden tahun 2020-2024 adalah:

“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.”

Berdasarkan lampiran 1 perpres Nomor 18 tahun 2020, telah ditetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2025. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Secara rinci sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan ditribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-

- undang. Pertama, UU cipta lapangan kerja. Kedua, UU pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan birokrasi, memprioritas investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
 5. Transformasi ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

III. 2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPENDA

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi kabupaten Lampung Tengah yaitu **“Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”**. Melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari satu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Menurut Permendagri 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Sasaran RPJMD juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMARTC.

Tujuan jangka menengah berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2021-2026 adalah meningkatkan penerimaan keuangan daerah.

Sasaran jangka menengah berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap :

- a. Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah

III. 2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam rangka kerja sama dengan masyarakat.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam Renja Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
 - a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
 - b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - g. Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 - j. Penagihan Pajak Daerah
 - k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 - l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
 - m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan dapat dilihat pada tabel T.C 33.



TC.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDUKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDUKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		Bapenda			APBD			
5 02	Keuangan		Bapenda			APBD			
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Bapenda	100	43,434.857.867	APBD		100	50.152.195.238
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Bapenda	100				100	
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	Bapenda	100				100	
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	Bapenda	100				100	
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	Bapenda	100	68.164.300,00	100		100	68.164.300
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	2	48.396.000,00	2		2	48.396.000
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	2	19.768.300,00	2		2	19.768.300

5	02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen penganggaran dan pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu	Bapenda		14.187.347.308,00				14.895.731.242
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	68	13.352.663.108,00	68		68	13.691.952.542
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	1	806.896.900,00	1		1	1,170,991,400
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bapenda	3	27.787.300,00	3		3	32,787,300
5	02				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	Bapenda	100		100		100	50,000,000
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bapenda	-		-		-	50,000,000
5	02				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase jenis kecukupan administrasi perkantoran yang tersedia	Bapenda		307.895.000,00				650,281,500
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bapenda	12	11.776.400,00	12		12	11,776,400
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bapenda	1	3.000.000,00	1		1	299,000,000
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bapenda	28	14.474.500,00	28		28	19,897,500
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bapenda	21	100.536.100,00	21		21	115,025,600

5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	90	178.108.000,00	90	90	204,582,000
5	02				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Kantor	Bapenda	100	0	100	100	793,350,000
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Bapenda	-	-	-	-	793,350,000
5	02				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana kantor yang tersedia	Bapenda		28.390.744.000			33.888.562.396
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bapenda	4	28.390.744.000	4	4	33.888.562.396
5	02				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jenis sarana dan prasarana aparatur yang optimal	Bapenda		480.707.259,00			520.120.800
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bapenda	23	325.690.000,00	23	23	325,690,000
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bapenda	89	119.280.800,00	89	89	134,580,800
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda	2	35.736.459,00	2	2	59,850,000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pajak Daerah	Bapenda	100	2.522.306.100,00	100	100	3,522,663,500
						Persentase Realisasi Retribusi Daerah		100		100	100	
						Persentase kepatuhan wajib pajak daerah		100		100	100	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pesentase Penerimaan Pendapatan Daerah	Bapenda	100	2.522.306.100,00	100	100	3,522,663,500

5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	10	47.294.000,00	10	10	49,894,000
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	10	41.964.000,00	10	10	53,664,000
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	23	131.084.700,00	23	23	175,522,200
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda					-
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	2	313.876.900,00	2	2	322,876,900
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda	12	209.915.000,00	12	12	480,715,000
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Bapenda	7400	1.390.407.900,00	7400	7400	1,763,150,400
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bapenda	651000	67.676.500,00	651000	651000	163,546,500
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	12800	45.193.500,00	12800	12800	86,630,700
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Bapenda	12	23.487.000,00	12	12	25,513,000
5	02	04	2.1	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	8	90.330.600,00	8	8	177,330,600
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda	3270	56.492.300,00	3270	3270	100,186,500

5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	10	58.815.500,00	10	10	73,815,500
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	11	45.768.200,00	11	11	49,818,200
					Jumlah				45.957.163.967			53.674.858.738

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 terdapat 2 (dua) program, 6 (enam) Kegiatan dan 27 (dua puluh delapan) Sub kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 yang tertuang dalam Rencana Kerja ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Tengah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dalam dilihat dalam tabel berikut:

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDUKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		Bapenda			APBD
5	02 Keuangan		Bapenda			APBD
5	02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Bapenda	100	43,434.857.867.00	APBD
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Bapenda	100		APBD
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	Bapenda	100		APBD
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	Bapenda	100		APBD
5	02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	Bapenda	100	68.164.300,00	APBD
5	02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	2	48.396.000,00	APBD
5	02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	2	19.768.300,00	APBD
5	02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen penganggaran dan pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu	Bapenda		14.187.347.308,00	APBD



5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	68	13.352.663.108,00	APBD
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	1	806.896.900,00	APBD
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Bapenda	3	27.787.300,00	APBD
5	02				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesentase jenis kecukupan administrasi perkantoran	Bapenda	100	307.895.000,00	APBD
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bapenda	-	11.776.400,00	APBD
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bapenda		3.000.000,00	APBD
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bapenda	12	14.474.500,00	APBD
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bapenda	1	100.536.100,00	APBD
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	28	178.108.000,00	APBD
5	02				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana kantor	Bapenda	21	28.390.744.000,00	APBD
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bapenda	90	28.390.744.000,00	APBD



5	02				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jenis sarana dan prasarana aparatur yang optimal	Bapenda	100	480.707.259,00	APBD
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bapenda	-	325.690.000,00	APBD
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bapenda		119.280.800,00	APBD
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda	4	35.736.459,00	APBD
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pajak Daerah	Bapenda		3.522.663.500,00	APBD
						Persentase Realisasi Retribusi Daerah		23		APBD
						Persentase kepatuhan wajib pajak daerah		89		APBD
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	Bapenda	2	2.522.306.100	APBD
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	100	47.294.000,00	APBD
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	100	41.964.000,00	APBD
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	100	131.084.700,00	APBD
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	100	313.876.900,00	APBD



5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan ,dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda	10	209.915.000,00	APBD
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Bapenda	10	1.390.407.900,00	APBD
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bapenda	23	67.676.500,00	APBD
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda		45.193.500,00	APBD
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Bapenda	2	23.487.000,00	APBD
5	02	04	2.1	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	12	90.330.600,00	APBD
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda	7400	56.492.300,00	APBD
5	02	04	2.01	13	Pengendalian,Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	651000	58.815.500,00	APBD
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	12800	45.768.200,00	APBD
Jumlah									45.957.163.967	



BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 ini merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2025. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini sebagai pedoman/acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

Rencana tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 adalah adanya masukan, informasi, saran dan data dari bidang-bidang untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang prospektif, realistis, dan akuntabel serta transparan dalam rangka mewujudkan pembangunan berasaskan keadilan untuk kesejahteraan rakyat menuju Lampung Tengah dan Terdepat.

Gunung Sugih, Januari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Drs. ASRUL SANI
NIP. 19660621 198603 1 002